

**EKSISTENSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM KOMUNITAS
NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN MADIUN**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIMANA SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SAIFUL ANWAR
NIM: 09370040**

**PEMBIMBING:
DRS. M. RIZAL QOSIM, M.Si.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

Abstrak

Sejarah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa tidak terlepas dari peranan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Pada perkembangannya Nahdlatul Ulama juga terlibat dalam politik. Dalam perjalanan politiknya banyak terjadi tantangan sehingga membuat Nahdlatul Ulama yang pada awalnya tidak terlibat dalam dunia politik praktis, melibatkan diri dalam politik praktis, kembali ke khittah dan berpolitik lagi.

Seiring dengan pergeseran paradigma perpolitikan di Indonesia dan terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari Orde Baru menjadi Reformasi membuat warga *nahdliyin* mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk partai politik sebagai wadah bagi aspirasi masyarakat Nahdlatul Ulama yang ingin berpolitik. Hal ini membuat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menentukan sikap mengingat Nahdlatul Ulama kembali ke khittah dan tidak terlibat dalam dunia politik. Akhirnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membentuk suatu tim untuk menampung aspirasi warga dalam pembentukan partai politik. Akhirnya keinginan warga Nahdlatul Ulama diamini oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sehingga melahirkan partai politik yang dinamakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Setelah terbentuknya Partai Kebangkitan Bangsa, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama segera membentuk Partai Kebangkitan Bangsa di setiap daerah, salah satunya adalah di Kabupaten Madiun. Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam suatu wilayah tidak lepas dari basis masanya yakni Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanannya di dunia politik, Partai Kebangkitan Bangsa tidak terlepas dari peranan warga *nahdliyin* termasuk di dalamnya kiai di Kabupaten Madiun. Kiai memiliki peranan yang penting dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih Partai Kebangkitan Bangsa. Meskipun Kabupaten Madiun mayoritas warga *nahdliyin*, tapi dalam pemilu tidak bisa meraih peringkat pertama. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam komunitas *nahdliyin* di Kabupaten Madiun.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan metode wawancara beberapa tokoh Partai Kebangkitan Bangsa dan warga *nahdliyin* di Kabupaten Madiun. Adapun metode yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif yang bersifat kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam memaparkan data-data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan historis-sosiologis yang melihat latar belakang berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Madiun.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Partai Kebangkitan Bangsa di kabupaten Madiun bisa eksis dalam komunitas warga Nahdlatul Ulama yang ada di kabupaten Madiun. Hal ini berdasarkan bahwasannya Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sarana politik bagi warga *nahdliyin* yang ingin terlibat dalam dunia politik di Kabupaten Madiun dan dengan melihat peran Partai Kebangkitan Bangsa terhadap warga *nahdliyin* itu sendiri, hanya saja dalam pemilu tidak bisa meraih peringkat pertama dalam pemilu. Hal ini dikarenakan calon legislatif yang kurang melakukan pendekatan yang intens terhadap warga *nahdliyin*, kurangnya finansial dan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa terhadap warga *nahdliyin*.

Keywords: Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Saiful Anwar
NIM : 09370040
Judul Skripsi : **Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Komunitas Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Madiun**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Jinayah Siyazah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam studi Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat dengan segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Februari 2013

Pembimbing

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adi Sucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/205/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DALAM KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA DI
KABUPATEN MADIUN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Saiful Anwar
NIM : 09370040
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Februari 2013
Dengan nilai : A- (90,00)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Oqsim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

Dr. Ahmad Yari Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 11 Februari 2013

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noerjaini, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Saiful Anwar
NIM :09370040
Jurusan :Jinayah Siyasa
Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Februari 2013
Yang menyatakan



Saiful Anwar
09370040

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

No.	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	b	-
3.	ت	t	-
4.	ث	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
5.	ج	j	-
6.	ح	h	-
7.	خ	kh	-
8.	د	d	-
9.	ذ	ẓ	z (dengan titik di atasnya)
10.	ر	r	-
11.	ز	z	-
12.	س	s	-
13.	ش	sy	-
14.	ص	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
15.	ض	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
16.	ط	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
17.	ظ	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
18.	ع	‘	koma terbalik letak di atas
19.	غ	g	-
20.	ف	f	-
21.	ق	q	-
22.	ك	k	-
23.	ل	l	-
24.	م	m	-
25.	ن	n	-
26.	و	w	-
27.	هـ/ه	h	-
28.	ء	‘	Apostrof
29.	ي	y	-
30.			

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syiddah* (◌ْ) ditulis rangkap.

Contoh: انه ditulis *innahu*

3. *Tā'marbūtah* di Akhir Kata

3.1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*

مكتبة ditulis *maktabah*

3.2. Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مكتبة الجامعة ditulis *maktabatu'l-jāmi'ah*

4. Vokal Panjang (*mad*)

Fathah (baris di atas) di tulis ā, *kasrah* (baris di bawah) di tulis ī, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya; الناس ditulis *an-nās*, الرحيم ditulis *ar-rahīm*, المسلمون ditulis *al-muslimūn*.

5. Vokal pendek yang berurutan dipisahkan dengan tanda pisah (-)

شيء قدير, ditulis *syai-in qadīr*

6. Kata Sandang Alif+Lam

Bila Alif + lam diikuti oleh huruf-huruf qamariyah, yang terkumpul dalam kata ابغي حرك وخف عقمه (alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, ' , q, m, t) ditulis *al*, misalnya ; المسلمون ditulis *al-muslimūn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرحمن ditulis *ar-rahmān*.

7. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya :

Penghubung antar kata menggunakan tanda petik ('), sedangkan penghubung dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-).

بسم الله الرحمن الرحيم dibaca *bismi'l-Lāhi'r-rahmāni'r-rahīm*

Motto

Hidup itu seperti gunung yang tinggi.....

Untuk mencapai puncaknya, kita harus mendaki gunung itu sekuat tenaga

Begitu pula dengan kesuksesan

Untuk mencapainya kita harus terus berusaha, berjuang, tidak boleh

menyerah dan senantiasa berjuang

Karena sesudah berusaha dan mengalami kesulitan, Allah telah menyiapkan

kemudahan.....

Halaman Persembahan

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Ibu dan bapakku serta adikq tercinta;

Guruku, dosenku, kiai yang telah berjasa dalam mengamalkan

ilmunya kepadaku;

Sahabat, saudara dan teman seperjuanganku;

Kepada almamterku UIN Suka;

Bangsa dan negeriku Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Mengetahui segalanya,
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas petunjuk, rahmad dan inayah-
Nya yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun bisa
menyelesaikan karya tulis skripsi ini.

Shalawat serta salam tetap terjunjung pada Baginda Nabi Muhammad
SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dan ajarannya di dunia ini yang
akan dikenang dan diamalkan sampai akhir zaman nanti.

Berkat pertolongan, karunia dan hidayah-Nya dan dengan petunjuknya
yang telah diberikan kepada penyusun dan yang pertolongan-Nya penyusun
harapkan sampai mati nanti. Penyusun mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah
skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana strata
satu (S 1) dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta dengan judul: *Eksistensi Partai Kebangkitan bangsa dalam
Komunitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Madiun*. Penyelesaian skripsi ini
tentunya tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu,
dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. M. Nur., S.Ag., M.Ag. Selaku ketua jurusan Jinayas Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan staffnya.
3. Bapak Subaidi S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyasah dan selaku dosen embimbing akademik yang telah banyak membantu penulis dan memberi banyak masukan serta support dan telah meluangkan banyak waktunya kepada penyusun sehingga penyusunan bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas semua sarannya penyusun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku pembimbing skripsi penyusun yang dengan segala kesabaran hati dan jiwa, ketekunan, keuletandengan senang hati telah meluangkan waktunya bagi penyusun dan telah berkenan memberikan bimbingannya serta waktunya dalam mengoreksi skripsi penyusun .
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan dosen-dosen jurusan Jinayah Siyasah pada khususnya yang telah mengajarkan dan mengamalkan ilmunya selama penyusun menempus studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Ibuku tercinta (Mu'alikah) yang telah banyak berjuang bagi penyusun mulai dari melahirkan, membesarkan dan mendidik penyusun dan memberikan cinta dan kasihnya yang tak pernah habis. Terima kasih atas semua doanya, dorongan moral, finansial demi lancarnya pendidikan penyusun. Untuk Bapak dan adikku terima kasih yang banyak atas dukungannya.
7. Kepada para pihak yang telah bersedia memberikan informasi yang penyusun perlukan. Bapak K.H. Mustaqim Basyari, K.H. Mochtar, Pak Djoko Setiono, Mas joko dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya.
8. Teman-teman seperjuangannku dalam menempuh pendidikan strata satu di jurusan Jinayah Siyasah angkatan 2009, khususnya Denda Anggia terima kasih yang banyak le' sudah membantu penulis dan sharing-sharing dengan penulis, Agus Sujadi (takmir), Ahmad Marzuki, Reza Abizar, Reva Winardi (semok), Siti Nur Anisa Amalia, Siti Mar'atus, Ikanova (gendud), Esti Rahayu (Dobleh), Basri Musthofa, Riski (kates), Si mbah Ardhian, Iyut, Arif Fuadi dan Juliana dan seluruh teman JS 09 yang tidak bisa penyusun tuliskan satu per satu. Peyusun mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya. Pertemanan, canda tawa, waktu kita bersama (nongkrong. Ngopi, maen ke pantai) tidak akan pernah penulis lupakan dan akan penulis ingat sampai kapanpun. Dari kalian semua penyusun bisa belajar mengenai arti teman dan sahabat.

9. Teman-teman kos bu Sri, bang rizal, bang Hendra, Coy, Ojix, Rizal Gendut, Dedi, om Dwik terima kasih atas semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bercanda dengan penulis, memberi bantuan di saat penulis galau terima kasih yang banyak. Semoga pertemanan kita terjaga sampai kita punya cucu dan anak.
10. Teman-teman BEM J JS, teman –teman IMADU (Ikatan Alumni Darul ‘Ulum), teman-teman Resimen Mahasiswa (Menwa), teman-teman PMII terima kasih semuanya berkat kalian semua penulis bisa belajar banyak dalam berorganisasi.
11. Buat si “genuk” terima kasih telah mengantarkanku ke mana-mana selama penyusun menempuh studi di Yogyakarta dan dalam mencari data di Madiun, serta yang telah menemaniku saat kencan pertama dan terima kasih kamu tidak pernah rewel.

Akhir kata, penyusun mengucapkan “Tak ada Gading yang Tak Retak” dan penyusun menyadari bahwasannya hasil penelitian ini belum bisa sempurna dan dengan sangat terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk menambah informasi, data dan fakta atau revisi yang belum ada dalam skripsi ini sehingga menjadi sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua dan bagi studi akademik berikutnya. Amien.

Yogyakarta, 5 Februari 2013

Penyusun

Saiful Anwar

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Abstrak	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Surat Pernyataan Skripsi	v
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13

BAB II:PARTAI POLITIK, PESANTREN DAN KIAI	15
A. Partai Politik Di Kabupaten Madiun.....	15
1. Definisi Partai Politik	15
2. Fungsi Partai Politik	16
3. Perkembangan Partai Politik di Kabupaten Madiun	19
C. Potret Pesantren Di Kabupaten Madiun	21
1. Definisi Pesantren	21
2. Unsur-unsur Pesantren Dan Bentuk-bentuk Pesantren Di Kabupaten Madiun	22
D. Kiai dan Politik Di Kabupaten Madiun.....	27
1. Definisi Kiai	27
2. Kiai Dan Politik Di Kabupaten Madiun	33

BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI PARTAI KEBANGKITAN

BANGSA KABUPATEN MADIUN.....	39
A. Kabupaten Madiun Dalam Lintasan Sejarah	39
1. Sejarah Kabupaten Madiun	39
2. Gambaran Umum Kabupaten Madiun	40
3. Model Keberagamaan Masyarakat Kabupaten Madiun	42
B. Profil Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Madiun	44
1. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa dan Perkembangannya di Kabupaten Madiun	44
2. Makna dan Lambang Partai Kebangkitan Bangsa	56

3. Platform Partai Kebangkitan Bangsa	57
4. Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Madiun	60
5. Prinsip perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa	61
B. Peran Partai Kebangkitan Bangsa Terhadap Masyarakat Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun	63
C. Penyebaran Partai Kebangkitan Bangsa dan Strategi Politik Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Madiun	66

**BAB IV: EKSISTENSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM
MASYARAKAT NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN MADIUN70**

A. Bentuk dan Pola Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Madiun	70
1. Peran Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Sosial Politik di Kabupaten Madiun	71
2. Peran Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Keagamaan di Kabupaten Madiun	72
3. Peran Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Ekonomi di Kabupaten Madiun	73
B. Kiai dalam Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Madiun	74
C. Dukungan Warga Nahdlatul Ulama Terhadap Partai Kebangkitan Bangsa..	78

BAB V: PENUTUP84

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86

DAFTAR PUSTAKA87

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemah Al-Quran dan Hadis

Biografi Tokoh

Surat Izin Penelitian

Pedoman Wawancara

Surat Bukti Wawancara

AD/ ART Nahdlatul Ulama

Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa

Mabda Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa

AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa

Hasil Pemilu Tahun 2004 dan 2009 Kabupaten Madiun

Foto-foto

Curriculum Vitae

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1 Daftar Nama Partai Politik Dalam Pemilu Tahun 2004 Di Kabupaten Madiun	19
Tabel 2.2 Daftar Nama Partai Politik Dalam Pemilu Tahun 2009 Di Kabupaten Madiun	20
Tabel 2.3 Budaya Politik	37

BAB IV

Tabel 4.1 Hasil Pemilu Tahun 2004 DPRD Kabupaten Madiun 5 Besar	82
Tabel 4.1 Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009	82

DAFTAR GAMBAR

Makna dan Lambang Partai Kebangkitan Bangsa	56
Gambar Baleho Calon Legislatif yang dipasang di Pinggir Jalan	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, politik memiliki peranan yang tidak kecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai suatu jabatan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pemilihan anggota DPR dan Presiden. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi ini. Menurut Aristoteles dan Plato, sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik (*en dam onia* atau *the good life*).¹ Secara alamiah manusia adalah makhluk yang berpolitik atau dalam bahasa latinnya adalah *zoon politicon* dan dalam bahasa Inggris disebut *man is by nature a political animal*.²

Dalam perjalanan politik nasional di Indonesia, keberadaan gerakan keagamaan memberikan peranan yang tidak kecil dalam kehidupan sosial politik yang terjadi di negara ini. Agama juga dipergunakan sebagai sumber-sumber rujukan untuk menyelesaikan suatu masalah jika seseorang mengalami kesulitan dalam hal berpolitik. Hal ini mengindikasikan bahwasannya agama merupakan salah satu institusi politik yang penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 13.

² T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2009), hlm. 1.

Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi keagamaan di Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1926.³Latar belakang pendirian Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari pesantren, di mana Nahdlatul Ulama didirikan oleh tokoh-tokoh yang memiliki basis pesantren yang memiliki kesamaan faham dan perilaku. Dalam hal ini faham yang dijadikan pedoman adalah faham Islam Ahlussunah wal Jamaah.

Pada dasarnya pesantren merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam pendidikan Islam, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu beralih fungsi menjadi lembaga perjuangan Islam.⁴ Pesantren juga terlibat dalam kegiatan politik untuk memperoleh tujuan utamanya yakni melestarikan dan mengembangkan Islam dalam masyarakat.⁵

Nahdlatul Ulama memiliki tugas utama, yakni berkaitan dengan pemberdayaan umat di segala bidang terutama bidang keagamaan, bidang sosial serta menjaga eksistensi jamaahnya. Seiring dengan berjalannya waktu Nahdlatul Ulama tidak hanya bergerak dalam bidang sosial keagamaan saja tapi juga terlibat dalam dunia perpolitikan dan mendirikan beberapa partai politik.⁶

³ Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*, cet-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003), hlm. 37.

⁴ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, cet-4 (Surabaya: Khalista, 2006) hlm. 1.

⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1982) hlm. 17.

⁶ Partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan idologi-idiologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas. Lihat Haryanto, *Sistem Politik – Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 86.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai politik yang berasaskan Islam yang didirikan di Jakarta oleh para Kiai Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi'ul Awal 1419).⁷ Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai politik yang berasaskan Pancasila dan merupakan partai politik Islam.⁸ Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa diawali dari banyaknya aspirasi kuat dari kalangan NU mengenai perlunya pendidikan politik bagi warga NU agar tidak terus menerus dimarjinalisasi oleh pemerintah dan rezim penguasa seperti yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru.⁹ Prinsip perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa adalah pengabdian kepada Allah, menegakkan keadilan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam ahlussunnah wal jamaah.¹⁰

Basis masa terbesar Partai Kebangkitan Bangsa ini berada di Jawa Timur. Secara kultural, Jawa Timur dibagi menjadi dua kawasan, yakni kawasan “Tapal Kuda” yang dikenal dengan daerah santri dan berada di sekitar daerah pesisir dan kawasan “Mataraman” yang terletak di pedalaman dan jauh dari pesisir.¹¹ Kawasan tapal kuda meliputi: Tuban, Lamongan, Gresik, Pasuruan, Pulau

⁷ “Partai Kebangkitan Bangsa,” Diakses dari Id. wikipedia. org/wiki. Partai _Kebangkita_ Bangsa pada tanggal 6 November 2012.

⁸ Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*, cet-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003), hlm. 153.

⁹ Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, (Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005), hlm.2.

¹⁰ Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*, cet-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003), hlm. 153.

¹¹ Syamsudin Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: proses nominasi dan seleksi calon legislatif pemilu 2004*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 30.

Madura. Kawasan mataraman meliputi: Jombang, Mojokerto, Kabupaten Madiun, Madiun, Magetan

Perkembangan politik di Kabupaten Madiun berkembang pesat seiring dengan perkembangan dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan adanya beberapa partai yakni partai politik yang berasaskan Islam maupun partai politik yang berasaskan nasionalisme yang bersaing dalam pemilu tahun 2004 sebanyak 24 partai politik dan pada tahun 2009 sebanyak 36 partai yang dipilih dari 44 partai politik.¹² Perjalanan dan perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Madiun tidak terlepas dari peran serta Kiai dan warga *Nahdliyin* yang ada di Kabupaten Madiun.

Kiai memiliki peranan yang tidak sedikit terhadap perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai Islam yang menjadikan seorang ulama atau kiai sebagai pembimbing dan pembina partai. Dalam kultur Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai dipandang dan ditempatkan sebagai pewaris ajaran Nabi dan perilakunya diikuti oleh masyarakat dan menjadikan seorang kiai sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, meskipun masyarakat Kabupaten Madiun adalah *nahdliyin* jika dilihat dari hasil pemilu tahun 2004 dan 2009 Partai Kebangkitan Bangsa menduduki peringkat tiga.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, keberadaan suatu partai politik dalam komunitas tertentu untuk meraih suara dalam pemilu merupakan fenomena sosial-politik yang menarik untuk dijadikan sebagai suatu

¹² Daftar nama partai politik tahun 2004 dan 2009 terlampir.

judul penelitian. Sebab berkembangnya suatu partai politik tergantung pada basis massa dukungan dan dari suatu komunitas di wilayah tertentu, semakin banyak jumlah warga di komunitas tersebut akan membuat suatu partai bisa eksis. Persoalan-persoalan inilah yang menarik penulis untuk mengangkat suatu karya ilmiah yang diterangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Komunitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Madiun.”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam komunitas Nahdlatul Ulama di kabupaten Madiun?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka:

1. Tujuan Penelitian

Dari pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi ini maka penelitian ini bertujuan:

- a) Untuk mengetahui seberapa besar eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam komunitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Madiun

- b) Untuk menjelaskan pemahaman mengenai eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam komunitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Madiun

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a) Dapat dijadikan referensi dan sebagai sumbangan bagi peneliti selanjutnya.
- b) Untuk menambah khazanah pengetahuan dan kepustakaan Islam dalam bidang politik Islam.
- c) Menambah wawasan tentang politik Islam, terutama dalam praktek berpolitik dan menjalankannya dalam kehidupan.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh relevansi dan kesinambungan penelitian mengenai eksistensi PKB dalam komunitas NU di kabupaten Madiun, penyusun melakukan penelusuran dari berbagai referensi yang berhasil dikumpulkan. Menurut hemat penulis, kajian mengenai NU dan partai politik Islam dalam hal ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebenarnya sudah cukup banyak. Akan tetapi penyusun belum menemukan literatur yang secara khusus membahas mengenai judul dan pokok masalah seperti yang penyusun tulis dalam karya ini. Namun dengan kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba untuk menelaah dari beberapa literatur yang ada sehingga pokok masalah dalam karya tulis ini layak

untuk diteliti. Beberapa karya tulis yang dijadikan rujukan oleh penyusun untuk penelitian ini di antaranya:

1. M. Amin Mubarak dalam skripsinya yang berjudul "Hubungan NU dan PKB dalam perspektif Siyasa." ¹³ Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara NU dan PKB ditinjau dari pandangan politik Islam di mana PKB merupakan salah satu partai Islam yang dimotori oleh ulama yang latar belakangnya adalah dari NU harus mempunyai suatu hubungan timbal balik sehingga tercipta suatu sistem perpolitikan yang berlandaskan Islam secara esensial.
2. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang membahas mengenai dasar-dasar politik dan bahasan dalam buku ini lebih banyak berupa teori-teori politik yang di gagas oleh beberapa ahli politik. ¹⁴
3. M. Ali Haidar dalam bukunya yang berjudul Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik. ¹⁵ Buku ini menjelaskan mengenai Nahdatul Ulama (NU) secara umum di antaranya membahas mengenai lahirnya NU, madzhab yang digunakan oleh NU yakni madzhab Ahlussunnah Waljamaah, NU dan pemilihan umum tahun 1955, aspek fikih yang dijadikan NU untuk menyikapi gejala-gejala

¹³ M.Amin Mubarak, *Hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Perspektif Siyasa*, skripsi, fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet-1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁵ M.Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998).

sosial politik. Namun pembahasan mengenai PKB masih sedikit dibahas.

4. Buku Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional karya Sudarno Shobron.¹⁶ Buku ini menjelaskan mengenai partai-partai politik yang dibentuk oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan sepak terjang partai politik tersebut dalam perpolitikan di Indonesia, akan tetapi pembahasan mengenai Partai Kebangkitan Bangsa juga masih sedikit.

E. Kerangka Teoritik

Setiap penelitian selalu menggunakan teori. Seperti dinyatakan Cooper dan Schinder mengemukakan bahwa, *A theory is a set of systematically interrelated concept, definitions and proposition that are advanced to explain and predict phenomena (fact).*¹⁷ Teori adalah seperangkat konsep definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan sebelumnya, untuk membahas mengenai eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam komunitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Madiun, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti eksistensi itu sendiri dan apa arti partai politik.

¹⁶ Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*, cet-1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003).

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 52.

Dalam kamus ilmiah populer, eksistensi artinya adalah keberadaan.¹⁸ Jika dikontekskan sesuai dengan judul yang diteliti bahwasannya keberadaan suatu partai dalam masyarakat tidak bisa terlepas dari peran dan dukungan masyarakat terhadap partai politik tersebut untuk meraih suatu kemenangan dalam pemilu.

Pengertian partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.¹⁹

Pada tahap pertama, penelitian ini menggunakan teori *behavior*, teori ini menerangkan bahwasannya partai politik dipengaruhi oleh perilaku individu maupun kelompok, dalam hal ini adalah perilaku politik komunitas Nahdlatul Ulama di Kabupaten Madiun. Instrumen dari teori *behavior* adalah memberikan inspirasi mengenai suatu pandangan baru mengenai kehidupan politik sebagai cara belajar masyarakat yang dicapai melalui pengalaman-pengalaman baru.²⁰ Teori ini menekankan pada tindakan-tindakan individual dalam politik, budaya politik dan orientasi (pandangan) politik seseorang dalam berpolitik sehingga

¹⁸ Plus A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 133.

¹⁹ Haryanto, *Sistem Politik – Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 86.

²⁰ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 211.

seseorang memiliki alasan untuk memilih suatu partai politik. Teori inilah yang menjadi dasar penelitian, sebab kajian utama yang dibahas adalah mengenai perilaku politik masyarakat Nahdlatul Ulama terhadap dukungannya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Madiun.

Tahap selanjutnya penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan dalam Islam. Hakekat kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik oleh seorang pemimpin dan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan sosial keagamaan kepemimpinan adalah suatu yang sangat urgen dalam mencapai cita-cita bersama. Jika dikontekskan dengan penelitian ini, bahwasannya pemimpin dalam suatu partai politik dalam hal ini adalah PKB mempunyai peran yang sangat besar untuk mendapat dukungan dari masyarakat demi eksistensi PKB itu sendiri di kalangan warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan gambaran mengenai cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai eksistensi PKB dalam komunitas NU di kabupaten Madiun ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang secara langsung terlibat ke lokasi penelitian yang dijadikan obyek penelitian untuk memperoleh data-data mengenai

Partai Kebangkitan Bangsa dan Nahdlatul Ulama di kabupaten Madiun. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah di beberapa Kecamatan di Kabupaten Madiun yang meliputi Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Madiun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu salah satu sifat penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta yang ditemukan serta menganalisa permasalahan yang ada dan menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Fakta yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah mengenai keberadaan suatu Partai Kebangkitan Bangsa dalam komunitas masyarakat *Nahdliyin* di kabupaten Madiun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelusuri perubahan sosial yang terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa dalam komunitas Nahdlatul Ulama di kabupaten Madiun dari tahun-ketahun. Sehingga dapat mengetahui perkembangan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa dari setiap periode serta mengetahui interaksi sosial dalam masyarakat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Madiun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan

ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.²¹ Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Yakni cara untuk memperoleh data mengenai suatu masalah eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam komunitas Nahdlatul Ulama di kabupaten Madiun. Dalam hal ini peneliti sebagai pengamat non partisipan.²²

b. Wawancara

Yakni cara untuk memperoleh data mengenai suatu masalah dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tertulis dan bertatap muka secara langsung maupun dengan menggunakan pesawat telepon dengan narasumber. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai tokoh-tokoh yang dianggap penting (*key person*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.²³ Dokumen merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang di diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.137.

²² *Ibid*, hlm. 145.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm.216.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan metode untuk mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari catatan hasil observasi dan wawancara sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang selanjutnya adalah menganalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan menggunakan metode pendekatan induktif, artinya metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa dalam komunitas Nahdlatul Ulama sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis dan dirumuskan dalam tiga pokok pembahasan yang nantinya akan dibagi menjadi lima bab yakni: pendahuluan, isi dan penutup. Pendahuluan terletak pada bab pertama, isi terletak pada bab kedua, ketiga dan keempat yang merupakan suatu analisis dari permasalahan yang dikaji, sedangkan penutup terletak pada bab lima.

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah yang digunakan sebagai dasar dari perumusan masalah, rumusan masalah untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti dan merupakan suatu pertanyaan yang dicari jawabannya melalui

pengumpulan data, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai partai politik, pesantren dan kiai yang meliputi perkembangan partai politik di Kabupaten Madiun, definisi pesantren, bentuk-bentuk pesantren di Kabupaten Madiun, kiai dan politik di Kabupaten Madiun.

Bab ketiga, membahas mengenai Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Madiun yang meliputi profil Partai Kebangkitan Bangsa yang terdiri dari latar belakang lahirnya dan perkembangannya di Kabupaten Madiun, visi dan misi, peranannya terhadap masyarakat di Kabupaten Madiun, strategi politik Partai Kebangkitan bangsa di Kabupaten Madiun

Bab keempat, berisi mengenai analisis terhadap eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Madiun yang terdiri dari bentuk dan pola eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap masyarakat *nahdliyin*, kiai dalam Partai Kebangkitan Bangsa dan dukungan warga *Nahdliyin* terhadap Partai Kebangkitan bangsa.

Bab kelima, yakni sebagai penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian-uraian sebelumnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan yang ada di Indonesia yang berlandaskan pada ajaran *ahlussunnah waljamaah*. Nahdlatul Ulama mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan agama Islam khususnya di Kabupaten Madiun dengan adanya pengajian-pengajian, tahlilan, yasinan. Peranan Nahdlatul Ulama ini juga terlihat dalam berbagai sektor khususnya politik dengan didirikannya suatu partai politik yang dinamakan Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan respon atas usulan dari warga *nahdliyin* yang ada di daerah seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Madiun yang merupakan daerah Mataraman dan daerah abangan, keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa ini dapat diterima oleh warga *nahdliyin* yang ada di kabupaten Madiun. Pertumbuhan dan perkembangan Partai Kebangkitan Bangsa di kabupaten Madiun bisa dikatakan tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga mengikuti setiap pemilu yang dilaksanakan di Indonesia.

Maka dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasannya eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam komunitas Nahdlatul Ulama bisa dikatakan eksis dan keberadaannya ada bagi warga Nahdlatul Ulama. Hal ini dapat dilihat dari peranan Partai Kebangkitan Bangsa terhadap warga *nahdliyin* itu sendiri dengan adanya pengajian, khataman Al-Qur'an, bantuan bangunan secara fisik dan materi dalam pembangunan Nahdlatul Ulama Center dan dilihat dari hasil pemilu meskipun dalam pemilu tidak bisa meraih peringkat pertama dan itu sudah bisa dikatakan eksis. Indikator eksistensi partai politik di Kabupaten Madiun adalah bahwasannya Partai Kebangkitan Bangsa merupakan sarana dan kendaraan politik bagi warga *nahdliyin* yang ingin terlibat dalam dunia politik di Kabupaten Madiun. Di samping itu Partai Kebangkitan Bangsa mengikuti pemilu setiap ada pelaksanaan pemilu mulai dari tahun 1998, 2004 dan 2009, masuk dalam urutan lima besar dan mempunyai basis masa yang cukup banyak.

Di dalam menghadapi pemilu Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Madiun juga sudah berusaha dengan keras dalam menghadapi pemilu dengan menggunakan beberapa strategi seperti: pendekatan terhadap Kiai lokal, pemasangan baleho yang terdapat foto calon legislatif, kampanye pemilu dan lain sebagainya. Meskipun sudah melakukan upaya dalam rangka meraih kemenangan absolut dalam pemilu, Partai Kebangkitan bangsa belum bisa untuk meraih peringkat pertama. Hal-hal yang menyebabkan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Madiun tidak bisa meraih peringkat pertama dikarenakan oleh berbagai hal sebagai berikut:

- 1) Pendekatan yang dilakukan oleh calon legislatif terhadap masyarakat masih kurang.
- 2) Kekuatan finansial yang dimiliki oleh calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa tidak sebesar partai-partai yang lainnya.
- 3) Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa terhadap warga *nahdliyin*.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penyusun usulkan demi eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa bagi warga *nahdliyin* di kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- a) Tetap menjaga dan memelihara hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa dengan warga *nahdliyin* di kabupaten Madiun yang sudah terjalin baik hingga saat ini;
- b) Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa lebih intens mendekati warga-warga Nahdliyin yang ada di desa-desa selain untuk kepentingan kampanye;
- c) Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa lebih sering mengadakan pengajian, tahlilan dan yasin bersama warga *nahdliyin* yang merupakan tradisi warga nahdliyin yang ada di desa-desa.
- d) Para calon legislatif yang akan menghadapi pemilu, sebaiknya melakukan pendekatan secara intens terhadap masyarakat *Nahdliyin* sebagai basis masa dukungan Partai Kebangkitan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani)

B. Kelompok Hadits:

Abu Hasan Al Mawardi, *Al-Ahkam Asulthaniyah wa Wilayatuh al-Diniyyah*,
Musthofa al-Asabil Halabi, Mesir, Cet-II

C. Kelompok Fikih:

Abdul, Shulthon, Hadi, dan Ma'shum, M, Zaein, *Landasan Amaliyah Nahdliyah*,
Jombang: Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, 2008.

Akhyar, Saiful, Lubis, *Konseling Islami Kyai & Pesantren*, cet pertama, eLSAQ
Press: Yogyakarta, 2007.

Anam, Khoirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala:Jatayu,
1985.

Anam, Khoirul, *Fikih Siyasah Wacana Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Ide
Pustaka, 2009

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*,
Jakarta: Penerbit LP3ES, 1982.

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syari'ah*, cet-3 Jakarta: Kencana, 2007.

Haidar, Ali, M., *Nahdatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam
Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Hajar, Ibnu, *Kiai di Tengah Pusaran Politik*, Jogjakarta: IRCisoD, 2009.

Ida, Laode, *Anatomi Konflik NU; Elit Islam dan Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1996.

Musthafa, Bisyr, *Risalah Ahlussunnah Wal-Jamaah*, Kudus: Yayasan Al Ibris,
1967.

Shobron, Sudarno, *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*, cet-1, Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003.

D. Buku-buku Lain

A, Plus, Partanto, dan Dahlan, M, Al Barry, *Kamus ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Amal, Ichlasul, (ed.), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.

Anwar, Ali, *Avonturisme NU: menjejaki Akar Konflik Kepentingan Politik Kaum Nahdliyyin*, Bandung: Humaniora, 2004.

Asmawi, *PKB Jendela Politim Gus Dur*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet-1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dodd, CH, *Pembangunan Politik*, trjm. Ratnawati Jakarta: Bina Aksara, 1986.

E. David, Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1987.

El, Heppy, Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2012.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2011.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Haris, Syamsudin, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: proses nominasi dan seleksi calon legislatif pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Haryanto, *Sistem Politik – Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

J. Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2010.

Koirudin, *Menuju Partai Advokasi*, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005

Mubarok, Amin, M. *Hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Perspektif Siyasah*, skripsi fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

- Muzadi, Muchith, Abdul, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, cet-4, Surabaya: Khalista, 2006.
- Nasir, Ridwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Purtanto, A, Pius dan Barry, Al, Dahlan, M., *Kamus ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1099.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demoratisasi Institusi*, Jakarta; Penerbit Erlangga, 2005.
- Ramlan Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rozaki, Abdur, *Menabur Kharisma Menuai kuasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Rudy, May, T., *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Salim, Haris, HS dan Fauzan, Uzair dan Ibnu, Umar, Sholeh, *Tujuh Mesin Pendulang Suara Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta: Lkis, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tim Penyusun, *Kabupaten Madiun dalam Angka 2012*, Kabupaten Madiun: BPS Kabupaten Madiun, 2012.
- Wiryo, R., *Organisasi Kekukatan Sosial Politik di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.

E. Undang-undang

Undang-undang No. 31 tahun 2003 tentang Partai Politik.

Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

F. Internet

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45.html>, diakses pada tanggal 15 februari 2013.

“Makna Lambang PKB,” diakses dari <http://www.dpp.pkb.or.id/makna-lambang-pkb> pada tanggal 6 Februari 2013.

“Partai Kebangkitan Bangsa,” diakses dari Id.Wikipedia.org/wiki/Partai_Kebangkitan_Bangsa pada tanggal 6 November 2012.

“Teori Behavioralisme dan Pemilu”, <http://vebrians.blogspot.com/2012/03/teori-behavioralisme-dan-pemilu.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2013

Wawancara

Wawancara dengan Joko Suwito, Anggota Pengurus DPC PKB Kab. Madiun, Kantor DPC PKB Kab. Madiun, Nglames, Madiun pada tanggal 21 Desember 2012.

Wawancara dengan K.H. Mustaqim Basyari, Ketua PBNU Kabup. Madiun pada tahun 1998 sekaligus pengasuh pondok pesantren salafiyah Al-Basyariyah, Kediaman K.H. Mustaqim Basyari, Pilangkenceng, Kab.Madiun, pada tanggal 20 Desember 2012.

Wawancara dengan Pak Djoko Setiono, Wakil Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Madiun, Kediaman Pak Djoko Setiono, Kebonsari, Kab. Madiun pada tanggal 20 Desember 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemah Al-Qur'an dan Hadits

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1	29	23	Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.
2	29	24	Dan demikian (pula) di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun
3	31	28	Sesungguhnya imam (khalifah) diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.
4	47	13	Allah sungguh telah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan serta menyantuni kerabat dekat, melarang tindakan keji dan munkar serta permusuhan. Demikian Allah memberi pelajaran bagi kamu, agar kamu sadar.

5	56	25	Katakanlah (Muhammad),” kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada Nya-kami berserah diri
6	76	7	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka

Biografi Tokoh

Biografi K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah putra pertama dari enam bersaudara lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Ayahnya adalah KH Wahid Hasyim putra dari KH Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Hj Sholehah adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, KH Bisri Syansuri.

Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar pada sang kakek, KH Hasyim Asy'ari. Saat serumah dengan kakek, Gus Dur diajari mengaji dan membaca Al Qur'an. Dalam usia lima tahun Gus Dur telah lancar membaca Al Qur'an. Pada saat ayahnya pindah Jakarta, di samping belajar formal di sekolah Gus Dur juga les privat Bahasa Belanda. Menjelang lulus SD, Gus Dur memenangkan lomba karya tulis (mengarang) se-Jakarta. Karenanya wajar jika pada masa kemudian banyak tulisan Gus Dur menghiasai berbagai media massa. Setelah lulus SD, Gus Dur dikirim orang tuanya belajar di Jogjakarta.

Pada tahun 1953 Gus Dur masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sambil mondok di Pesantren Krapyak. Setelah lulus dari SMEP, Gus Dur melanjutkan belajar di Pesantren Tegalrejo Magelang. Pesantren ini diasuh KH Chudhari, kiai yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi. Di bawah bimbingan kiai ini pula, Gus Dur mengadakan ziarah ke makam-makam para wali di Jawa. Setelah dua tahun di pesantren Tegalrejo, Gus Dur lalu

kembali ke Jombang dan tinggal di Pesantren Tambak Beras. Pada usia 22 tahun, Gus Dur ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, kemudian ke Mesir melanjutkan studi di Universitas Al Azhar.

Pada 1966 Gus Dur pindah ke Irak, beliau masuk Departement of Religion di Universitas Bagdad sampai 1970. Di luar kampus, Gus Dur rajin mengunjungi makam-makam para wali, termasuk makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri jamaah tarekat Qadiriyyah. Gus Dur juga menggeluti ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi, pendiri aliran tasawuf yang diikuti jemaah Nahdlatul Ulama. Di sinilah Gus Dur menemukan sumber spiritualitasnya.

Setelah dari Bagdad Gus Dur menetap di Belanda selama enam bulan dan mendirikan Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia yang tinggal di Eropa. Untuk biaya hidup di rantau, dua kali sebulan ia pergi ke pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih kapal tanker.

Sepulang dari pengembaraan mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang, memilih menjadi guru. Pada 1971 ia bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng.

Pada 1974 Gus Dur diminta pamannya, K.H. Yusuf Hasyim membantu di Pesantren Tebu Ireng dengan menjadi sekretaris. Gus Dur mulai sering mendapat undangan menjadi nara sumber pada sejumlah forum diskusi, baik di dalam maupun luar negeri.

Pada 1979 Gus Dur pindah ke Jakarta. Pada awalnya, Gus Dur merintis Pesantren Ciganjur. Pada awal 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil katib

syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat diskusi dan perdebatan serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin ilmu. Karier yang dianggap 'menyimpang' -dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada 1983. Gus Dur juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) 1986, 1987. Pada 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh tim ahl hall wa al-'aqdi yang diketuai K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 NU di Situbondo. Jabatan itu kembali dikukuhkan pada muktamar ke-28 di pesantren Krpyak Jogjakarta (1989), dan muktamar di Cipasung Jawa Barat (1994). Jabatan ketua umum PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden ke-4 RI.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



SURAT REKOMENDASI

Nomor : UIN.02 / DS / PP.00.9 / 1792 / 2012

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

Nama : Saiful Anwar
NIM : 09370040
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : EKSISTENSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DALAM KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN MADIUN

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan
menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Yogyakarta, 26 November 2012

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bidang Akademik


H. Kamsi, M.A
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1843 a / 2012
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin

Yogyakarta, 11 Desember 2012

Kepada
Yth. GUBERNUR DIY
Cq. KEPALA BAPEDA DIY
di. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM
1.	SAIFUL ANWAR	09370040

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : EKSISTENSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN MADIUN

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1843 / 2012
Sifat : -
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin

Yogyakarta, 11 Desember 2012

Kepada
Yth. GUBERNUR JAWA TIMUR
Cq. KEPALA BAPEDA JAWA TIMUR
di. SURABAYA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM
1.	SAIFUL ANWAR	09370040

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : EKSISTENSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN MADIUN

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 11 Desember 2012

Nomor : 070/9460/V/12/2012

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Timur
Cq. Bakesbang
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka Yk
Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/1792/2012
Tanggal : 26 November 2012
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : SAIFUL ANWAR
NIM / NIP : 09370040
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : EKSISTENSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM KOMUNITAS NAHDATUL ULAMA DI KABUPATEN MADIUN
Lokasi : - Kota/Kab. MADIUN Prov. JAWA TIMUR
Waktu : Mulai Tanggal 11 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Pembantu Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah & Keguruan UIN
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 18 Desember 2012

Nomor : 070/12623 / 203 / 2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Bupati Madiun
Cq. Kepala Bakesbang dan Politik
di
MADIUN

Menunjuk surat : Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal : 11 Desember 2012
Nomor : 070/9460/W/12/2012
Perihal : Ijin Penelitian

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SAIFUL ANWAR
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : " EKSITENSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM KOMUNITAS NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN MADIUN "

Penanggung Jawab/ Pembimbing : DRS. M. RIZAL QOSM, M.Si
Peserta :
Waktu : 3 (tiga) bulan
Lokasi : Kabupaten Madiun

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat ;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat ;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :
Yth.1. Sekda Provinsi DIY di Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.

EDDY SUPRIYANTO, S.P.P., M.PSDM.
Pembina
NIP. 19750319 199511 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

Madiun, 4 Januari 2013

Nomor : 072/ 05 /402.205/2013
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Kerua DPC PKB
Kabupaten Madiun
Di-
MADIUN

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 18 Desember 2012
Nomor : 070 / 12623 / 203 / 2012

Setelah diadakan berbagai pertimbangan, maka dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk melakukan penelitian di wilayah Kantor / Instansi Saudara oleh :

Petanggung Jawab : SAIFUL ANWAR
Pekerjaan/Mahasiswa : Fakultas Syari'ah dan Hulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : JL. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Tema : " EKSISTENSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM KOMUNITAS NAHDATUL ULAMA DI KABUPATEN MADIUN "
Lama Survey/Riset : 3 (tiga) bulan terhitung surat ini dikeluarkan.
Peserta : 1 (satu) orang
Lokasi Survey/Riset : Kabupaten Madiun

Selama melakukan penelitian agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Setelah tiba di tempat / lokasi wajib melaporkan maksud kedatangannya kepada Kepala Wilayah/ Kantor/ Instansi yang dituju.
- b. Mentaati segala peraturan yang berlaku.
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban.
- d. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
- e. Setelah selesai melakukan penelitian melaporkan kepada Kepala Wilayah / Kantor / Instansi tempat melakukan penelitian.
- f. Surat rekomendasi ini akan dicabut / dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ternyata tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuannya disampaikan terima kasih

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN**



KURNIA AMINULLOH
Pembina Tk. I
NIP. 19700702 199003 1 001

Tembusan :
Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
-2 Arsip

Pedoman wawancara

1. Maaf boleh tahu namanya siapa?
2. Jabatan anda di PKB Kab. Madiun?
3. Kapan PKB di Kab. Madiun didirikan?
4. Siapa saja yang ikut andil dalam berdirinya PKB di Kab. Madiun?
5. Gambaran PKB di madiun itu seperti apa?
6. Bagaimana perkembangan PKB di Kab. Madiun semenjak dari lahir-sekarang?
7. Kita ketahui bahwasannya PKB basis masanya adalah NU dan pesantren, lha apa banyak para Kiai yang ada di kab.Madiun banyak yang ikut/bergabung dalam PKB?
8. Kalo banyak apa ada pengaruh Kiai terhadap PKB dalam mempengaruhi sikap politik masyarakat NU?
9. Apa PKB memberi kontribusi terhadap warga NU yang ada di Kab. Madiun?
10. Kalo ia, apa kontribusinya?
11. Dalam garis perjuangan PKB di kab. Madiun, kegiatan apa yang sering dilakukan bersama dengan warga NU?
12. Bagaimana hubungan antara PKB dengan NU di kab. Madiun?

wawancara untuk NU

1. Maaf boleh tahu namanya siapa?
2. Apa yang anda ketahui mengenai NU?
3. Menurut anda, bagaimana NU di Kab. Madiun?
4. Apa anda tahu mengenai PKB?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai PKB?
6. Apa anda suka dengan PKB?
7. Alasannya suka atau tidak?
8. Apa ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga NU di desa ini?
9. Apa saja?
10. Apa PKB memberi kontribusi terhadap warga NU yang ada di Kab.
Madiun?
11. Kalo ia, apa kontribusinya?
12. Bagaimana hubungan antara NU dengan PKB di desa ini?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Mustaqim Basyari
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa sudah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa:

Nama : Saiful Anwar
NIM : 09370040
Jur./Semester : Jinayah Siyasah/ VIII
Fak./Univ. : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : *Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Komunitas Nahdlatu-
Ulama di Kabupaten Madiun*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Madiun, 2012

Yang Menyatakan



(_____)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bp. Djoko Setijono

Pekerjaan :

Alamat : Jl. PEGAL RUM KIRI / RW 06 BANGUNAN - Dolo
Madiun

Menyatakan bahwa sudah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa:

Nama : Saiful Anwar

NIM : 09370040

Jur./Semester : Jinayah Siyasah/ VIII

Fak./Univ. : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

* Judul Skripsi : *Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Komunitas Nahdlatu-
Ulama di Kabupaten Madiun*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Madiun, 2012

Yang Menyatakan

(Drs. DJOKO SETIJONO)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SUWITO
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : RT. 12 Ds. BIRONG KEC/KAB. MADIUN

Menyatakan bahwa sudah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa:

Nama : Saiful Anwar
NIM : 09370040
Jur./Semester : Jinayah Siyasah/ VIII
Fak./Univ. : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : *Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Komunitas Nahdlatu-l
Ulama di Kabupaten Madiun*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Madiun, 2012

Yang Menyatakan


(JOKO SUWITO)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Moch tar
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa sudah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa:

Nama : Saiful Anwar
NIM : 09370040
Jur./Semester : Jinayah Siyasa/ VIII
Fak./Univ. : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : *Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Komunitas Nahdlatu-l
Ulama di Kabupaten Madiun*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Madiun, 2012

Yang Menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholid Mararif, S.Hum
Pekerjaan : Wira Karyawan BUMN
Alamat : DS. Sambirejo RT. 01 / 01 Kec. Geger, Kab. Madiun

Menyatakan bahwa sudah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa:

Nama : Saiful Anwar
NIM : 09370040
Jur./Semester : Jinayah Siyasah/ VIII
Fak./Univ. : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : *Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Komunitas Nahdlatu-l Ulama di Kabupaten Madiun*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Madiun, 31 Desember 2012

Yang Menyatakan

(Cholid Mararif)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MU'ARIL HIDAYAT
Pekerjaan : SWASTA
Alamat : BONSAARI, MADIUN

Menyatakan bahwa sudah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan mahasiswa:

Nama : Saiful Anwar
NIM : 09370040
Jur./Semester : Jinayah Siyasah/ VIII
Fak./Univ. : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : *Eksistensi Partai Kebangkitan Bangsa dalam Komunitas Nahdlatu-l
Ulama di Kabupaten Madiun*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Madiun,

2012

Yang Menyatakan

(MU'ARIL HIDAYAT)

AD ART NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA (NU)
NAHDLATUL ULAMA

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 1

- (1) Perkumpulan/Jam'iyah ini bernama Nahdlatul Ulama disingkat NU.
- (2) Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M untuk waktu yang tak terbatas.

Pasal 2

Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pengurus Besarnya.

Pasal 3

- (1) Nahdlatul Ulama sebagai Badan Hukum Perkumpulan bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial.
- (2) Nahdlatul Ulama memiliki hak-hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset-aset lainnya.

BAB II

PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4

Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.

Pasal 5

Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal-Jama'ah dalam bidang aqidah mengikuti *madzhab* Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Pasal 6

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama berasakan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

LAMBANG

Pasal 7

Lambang Nahdlatul Ulama berupa gambar bola dunia yang dilingkari tali tersimpul, dkitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) bintang terletak melingkar di atas garis khatulistiwa yang tersebar diantaranya terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang lainnya terletak melingkar di bawah garis khatulistiwa, dengan tulisan NAHDLATUL ULAMA dalam huruf Arab yang melintang dari sebelah kanan bola dunia ke sebelah kiri, semua terlukis dengan warna putih di atas dasar hijau.

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

(1) Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/ *Jam'iyah diniyyah islamiyah ijtima'iyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

(2) Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal-Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang

berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal-Jama'ah.
2. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
3. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).
4. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
5. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khaira Ummah*.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

(2) Ketentuan untuk menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Pengurus Besar
2. Pengurus Wilayah
3. Pengurus Cabang
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang
5. Pengurus Ranting
6. Pengurus Anak Ranting

Pasal 13

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi: Lembaga, Lajnah dan Badan Otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan organisatoris jam'iyah Nahdlatul Ulama.

BAB VII

KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT

Pasal 14

- (1) Kepengurusan terdiri dari Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah.
- (2) Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, dan pengurus Majelis Wakil Cabang.
- (3) Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama.
- (4) Tanfidziyah adalah pelaksana.

(5) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

(1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Mustasyar Pengurus Besar.
2. Pengurus Besar Harian Syuriah.
3. Pengurus Besar Lengkap Syuriah.
4. Pengurus Besar Harian Tandfidziah.
5. Pengurus Besar Lengkap Tandfidziah.
6. Pengurus Besar Pleno.

(2) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Mustasyar Pengurus Wilayah.
2. Pengurus Wilayah Harian Syuriah.
3. Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah.
4. Pengurus Wilayah Harian Tanfidziah.
5. Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziah
6. Pengurus Wilayah Pleno.

(3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Mustasyar Pengurus Cabang.
2. Pengurus Cabang Harian Syuriah.
3. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah.
4. Pengurus Cabang Harian Tanfidziah.
5. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziah.
6. Pengurus Cabang Pleno.

(4) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Mustasyar Pengurus Cabang.
2. Pengurus Cabang Harian Syuriah.
3. Pengurus Cabang Lengkap Syuriah.
4. Pengurus Cabang Harian Tanfidziah.
5. Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziah.

6. Pengurus Cabang Pleno.
- (5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri atas:
1. Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang.
 2. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah.
 3. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriah.
 4. Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah.
 5. Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah.
 6. Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno.
- (6) Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1. Pengurus Ranting Harian Syuriah.
 2. Pengurus Ranting Lengkap Syuriah.
 3. Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah.
 4. Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah.
 5. Pengurus Ranting Pleno.
- (7) Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama terdiri dari:
1. Pengurus Anak Ranting Harian Syuriah.
 2. Pengurus Anak Ranting Lengkap Syuriah.
 3. Pengurus Anak Ranting Harian Tanfidziyah.
 4. Pengurus Anak Ranting Lengkap Tanfidziyah.
 5. Pengurus Anak Ranting Pleno.
- (8) Ketentuan mengenai susunan dan komposisi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

- (1) Masa Khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 adalah lima tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali Pengurus Cabang Istimewa selama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa jabatan pengurus Lembaga dan Lajnah disesuaikan dengan jabatan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing.

(3) Masa Khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 (dua) periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 (satu) periode.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 17

Mustasyar bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus Nahdlatul Ulama menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak.

Pasal 18

Syuriyah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

Pasal 19

Tanfidziyah mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi sesuai tingkatannya.

Pasal 20

Ketentuan tentang rincian wewenang dan tugas sesuai pasal 17, 18 dan 19 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi

- (1) Permusyawaratan Tingkat Nasional
- (2) Permusyawaratan Tingkat Daerah.

Pasal 22

Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari:

1. Muktamar
2. Muktamar Luar Biasa
3. Musyawarah Nasional Alim-Ulama
4. Konferensi Besar

Pasal 23

Permusyawaratan tingkat daerah yang dimaksud pada pasal 21 terdiri dari:

1. Konferensi Wilayah
2. Musyawarah Kerja Wilayah
3. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa
4. Musyawarah Kerja Cabang/Musyawarah Kerja Cabang Istimewa
5. Konferensi Majelis Wakil Cabang
6. Musyawarah Majelis Wakil Cabang
7. Musyawarah Ranting
8. Musyawarah Anak Ranting

Pasal 24

(1) Permusyawaratan di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan Tingkat Nasional dan Tingkat Daerah.

(2) Permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini terdiri dari :

1. Kongres
2. Rapat Kerja

(3) Permusyawaratan Badan Otonom merujuk kepada dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama dan peraturan-peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(4) Badan Otonom harus meratifikasi hasil permusyawaratan Nahdlatul Ulama.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
RAPAT-RAPAT

Pasal 26

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang dilakukan di masing-masing tingkat kepengurusan.

Pasal 27

Rapat-rapat di lingkungan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

1. Rapat Pleno
2. Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah
3. Rapat Harian Syuriah
4. Rapat Harian Tanfidziyah
5. Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal 27 akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29

(1) Keuangan Nahdlatul Ulama digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

(2) Sumber dana Nahdlatul Ulama diperoleh dari:

1. Uang pangkal
2. Uang *I' anah Syahriyah*
3. Sumbangan
4. Usaha-usaha lain yang halal.

(3) Ketentuan penerimaan dan pemanfaatan keuangan yang termaktub dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Kekayaan organisasi adalah inventaris dan aset organisasi yang berupa harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh Organisasi/ Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB XII PERUBAHAN

Pasal 31

(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan Mukhtamar yang sah yang dihadiri sedikitnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa yang sah dan sedikitnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah suara yang sah.

(2) Dalam hal Mukhtamar yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai quorum, maka ditunda selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Mukhtamar dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

BAB XIII PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 32

(1) Pembubaran Perkumpulan/ Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

(2) Apabila Nahdlatul Ulama dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada organisasi atau badan amal yang sefaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 33

Muqaddimah Qanun Asasy oleh Rais Akbar Hadratus Syaikh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan Naskah Khittah Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Ditetapkan di Jakarta, 6 Jumadil Akhir 1431/20 Mei 2010

NASKAH DEKLARASI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa dimasa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Didalam tatanan kehidupan yang demokratis itu, warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Jakarta, 29 Rabiul Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M

Para Deklarator

MUNASIR ALI

ILYAS RUCHIYAT

ABDURRAHMAN WAHID

A. MUSTOFA BISRI

A. MUHITH MUZADI

Mabda Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-'adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta'awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

3. Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.
4. Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan

Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
6. Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide

perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

7. Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya
8. Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak

untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

9. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

AD ART PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

MUKADDIMAH

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang menegajawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta pemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan lestarnya lingkungan hidup bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diridloi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan negara dengan berakhlakul karimah.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didirikanlah PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat PKB; Partai Kebangkitan Bangsa didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas; Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam Mukhtamar.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 3

Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.

Pasal 6

Partai berfungsi:

- (a) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi;
- (b) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan partisipasi politik;
- (c) Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat;
- (d) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik.
- (e) Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

Partai bertujuan:

- (a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- (b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
- (c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Pasal 8

Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Bidang Agama: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;

Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;

Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;

Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;

Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

BAB VI
LAMBANG

Pasal 9

Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB dibawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 10

Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima menjadi anggota Partai.

Pasal 11

Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN SERTA PERANGKAT
PARTAI

Pasal 12

(1) Struktur Organisasi Partai terdiri dari:

- a. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP;

- b. Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;
 - c. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC;
 - d. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
 - e. Organisasi Tingkat Desa/ Kelurahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt;
 - f. Organisasi Tingkat Dusun/ Lingkungan/ Kawasan Pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPART;
- (2) Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pengurus Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat DPCP.

Pasal 13

Kelengkapan Partai terdiri dari:

- a. Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut Departemen;
- b. Kelengkapan Partai di Daerah Propinsi disebut Biro;
- c. Kelengkapan Partai di Daerah Kabupaten/ Kota disebut Divisi;
- d. Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan disebut Seksi;

Pasal 14

Perangkat Partai terdiri dari Lembaga, Badan Otonom dan Fraksi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Kelengkapan, dan Perangkat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI

Pasal 16

Susunan Kepengurusan Partai pada masing-masing tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri dari:
Dewan Syura;
Dewan Tanfidz.

Pasal 17

(1) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan tertinggi Partai yang membuat dan menetapkan pedoman umum kebijakan utama Partai;
(2) Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPART) adalah pimpinan tertinggi Partai yang menjadi rujukan utama atas pedoman umum kebijakan-kebijakan utama Partai pada tingkatannya;
(3) Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif Partai yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis Partai.

Pasal 18

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas serta wewenang Dewan Syura dan Dewan Tanfidz diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

(1) Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi:
a. Muktamar
b. Muktamar Luar Biasa

- c. Musyawarah Kerja Nasional
 - d. Musyawarah Pimpinan Nasional
 - e. Musyawarah Wilayah
 - f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
 - g. Musyawarah Kerja Wilayah
 - h. Musyawarah Pimpinan Wilayah
 - i. Musyawarah Cabang
 - j. Musyawarah Cabang Luar Biasa
 - k. Musyawarah Kerja Cabang
 - l. Musyawarah Pimpinan Cabang
 - m. Musyawarah Anak Cabang
 - n. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
 - o. Musyawarah Kerja Anak Cabang
 - p. Musyawarah Ranting
 - q. Musyawarah Ranting Luar Biasa
 - r. Musyawarah Kerja Ranting
 - s. Musyawarah Anak Ranting
 - t. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa
 - u. Musyawarah Kerja Anak Ranting
- (2) Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XI

PENGAMBILAN PUTUSAN

Pasal 20

- (1) Pengambilan putusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI

Pasal 21

Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai;
- c. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
- d. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 22

(1) Partai hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar yang diselenggarakan khusus untuk itu.

(2) Muktamar tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Wilayah dan dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus Cabang dan keputusan yang dihasilkan itu dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga suara yang hadir dalam Muktamar.

(3) Apabila terjadi pembubaran Partai, maka segala hak milik Partai diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Muktamar.

BAB XIV
HIERARKHI TATA URUTAN ATURAN PARTAI

Pasal 23

Tata Urutan Aturan Partai terdiri dari :

- a. Mabda' Siyasi.

- b. Anggaran Dasar.
- c. Anggaran Rumah Tangga
- d. Peraturan Partai
- e. Keputusan Partai

BAB XV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Untuk pertama kalinya, Dewan Pengurus Pusat dibentuk oleh Deklarator, Dewan Pengurus Wilayah dibentuk oleh Tim Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dibentuk oleh Tim Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting dibentuk oleh Pengurus Anak Cabang.

Pasal 25

Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, Dewan Pengurus Pusat harus mengadakan Muktamar dalam tempo satu tahun sejak dideklarasikannya Partai, demikian pula Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dan Dewan Pengurus Ranting berkewajiban menyelenggarakan permusyawaratan sesuai tingkatan masing-masing.

Pasal 26

Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulai berlaku sejak tanggal dideklarasikannya Partai.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Mukhtar;
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 18 April 2005

MUKTAMAR II

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
PIMPINAN SIDANG PARIPURNA KE III

dr. H. Sugiati Ahmad Sumadi SKM

Ketua

Hj. Zunatul Mafruchah

Sekretaris

HASIL PEROLEHAN SUARA
DPR, DPRD PROPINSI, DPRD KABUPATEN
PEMILU TAHUN 2004
DI KABUPATEN MADIUN

NO	PARTAI POLITIK	DPR	DPRD PROPINSI	DPRD KABUPATEN					JUMLAH
				DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
1	PNI MARHAENISME	3383	3395	504	1153	1689	217	265	3828
2	PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT	1104	1076	427	151	154	155	177	1064
3	PARTAI BULAN BINTANG	5219	5791	858	666	849	1978	1236	5587
4	PARTAI MERDEKA	1122	1173	-	119	606	-	176	901
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	9484	9990	1945	1169	541	1924	4813	10392
6	PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN	708	692	113	185	149	120	125	692
7	PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU	1747	1936	1006	717	292	138	142	2295
8	PARTAI NASIONALIS BANTENG KEMERDEKAAN	6756	7026	535	626	4704	1559	-	7424
9	PARTAI DEMOKRAT	29292	28133	6211	3618	5126	3661	4160	22776
10	PARTAI KEADILANAN PERSATUAN INDONESIA	3360	3311	1038	823	534	616	767	3778
11	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	2082	2057	519	282	717	215	325	2058
12	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	1175	1250	98	106	-	103	892	1199
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	8976	8768	2039	1435	1218	1436	1926	8054
14	PARTAI KARYA PEDULU BANGSA	3810	3763	623	601	-	898	933	3055
15	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	60567	61353	10533	9369	11236	10921	19131	61190
16	PARTAI KEADILANSEJAHTERA	22328	18978	2011	2304	1336	3089	9963	18703
17	PARTAI BINTANG REFORMASI	4554	4648	551	1151	200	608	2011	4521
18	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	124499	129147	23696	31802	29115	26299	22361	133273
19	PARTAI DAMAI SEAJHTERA	3039	3046	879	682	693	502	291	3047
20	PARTAI GOLONGAN KARYA	83153	85704	16229	11331	23965	16571	20480	88576
21	PARTAI PATRIOT PANCASILA	2197	2196	317	553	-	-	1424	2294
22	PARTAI SERIKAT INDONESIA	1803	1767	323	417	239	512	485	1976
23	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1358	1269	102	133	736	111	321	1403
24	PARTAI PELOPOR	2273	2343	-	-	1031	966	587	2584
	JUMLAH	383989	388812	70557	69393	85130	72599	92991	390670

Foto-foto



K.H. Mustaqim Basyari



H. Djoko Setiono



K.H. Muchtar



Kantor DPC PKB Kab. Madiun



Joko Suwito



Mu'aril Hidayat

Curriculum Vitae

Data Diri

Nama : Saiful Anwar

Tempat Tanggal Lahir: Madiun, 6 April 1990

Alamat Asal : Jl. Mutiara Indah V/19 RT 13 RW 03 Kartoharjo Kelun
Madiun

E-mail : Maz_say41@yahoo.com

Alamat Yogyakarta : Jl. Ori 1 C Paprinngan Caturtunggal Depok Slman
Yogyakarta

Nama Ayah : Gunarto

Nama Ibu : Mu'alikah

Alamat : Jl. Mutiara Indah V/19 RT 13 RW 03 Kartoharjo Kelun
Madiun

Riwayat Pendidikan Formal

- TK Tunas Rimba Madiun tahun 1994-1996
- MI Islamiyah 02 Madiun tahun 1996-2002
- SMP N 3 Unggulan Peterongan Darul Ulum Jombang tahun 2002-2005
- SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPP-T RSBI Jombang tahun 2005-2008
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009-sekarang

Pengalaman Organisasi

- Anggota OSIS bidang olahraga SMPN 3 Unggulan Peterongan Darul Ulum Jombang tahun 2003-2004
- Anggota OSIS bidang minat dan bakat SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPP-T RSBI tahun 2007-2008
- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ashram Bangsa kor. Gertak tahun 2009-sekarang
- Resimen Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2009-2010
- Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah bidang minat, bakat dan kemampuan tahun 2011-2013
- Ketua IKALUNG (Ikatan Alumni SMA Unggulan) Yogyakarta tahun 2011-2012
- Anggota IMADU (Ikatan Alumni Darul Ulum) Yogyakarta tahun 2011-2012